



OPTIMASI PERAN SUKUK DI INDONESIA: PELUANG PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Hilwa Fitri Millenia

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

hilwafitri01@gmail.com

Abstrak

Investasi merupakan hal yang sangat penting dalam membangun perekonomian negara. Peran perusahaan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah melakukan ekspansi untuk menghasilkan output yang tinggi. Ekspansi tentunya membutuhkan dana yang besar agar perusahaan dapat memperoleh dana dari investor dengan menerbitkan sukuk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan sukuk dan bagaimana peran sukuk dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan penelitian kepustakaan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari literatur dan referensi yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sukuk merupakan salah satu instrumen keuangan syariah yang memiliki peran penting dalam perkembangan pembangunan ekonomi di Indonesia. Meski penjualan sukuk sendiri belum maksimal, terdapat beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan peran sukuk di Indonesia.

Kata Kunci: Sukuk, Pembangunan Ekonomi, Negara

PENDAHULUAN

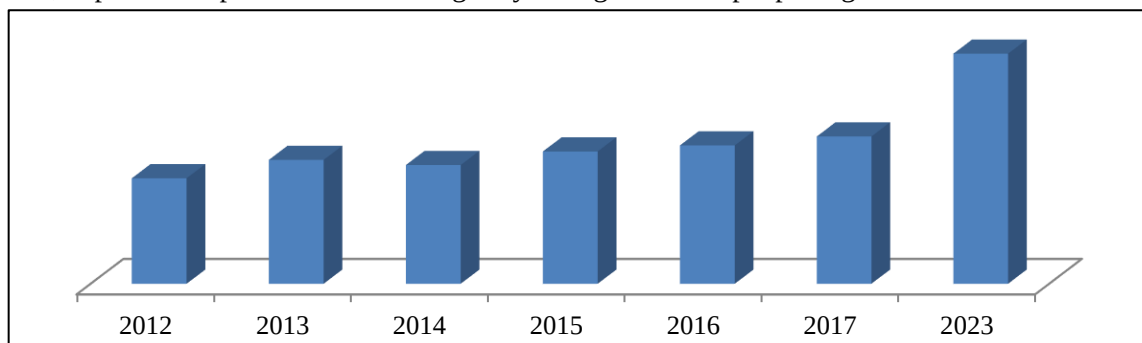
Sukuk merupakan salah satu instrumen investasi syariah yang berkembang pesat. Global Islamic Finance Report 2018 menyatakan bahwasannya Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan keuangan syariah. Karena Indonesia merupakan penduduk muslim yang besar. Dengan kondisi tersebut investasi melalui sektor keuangan Syariah masih terbuka peluang yang besar untuk tumbuh. Perkembangan pasar modal syariah terlihat pada pesatnya pertumbuhan jumlah investor syariah meningkat 1.650%. Per Desember 2020, investor syariah telah mencapai 85.891 investor atau 5,5% dari total investor saham Indonesia. Artinya ruang untuk tumbuh masih besar sekali untuk investor saham Syariah¹.

Salah satu instrumen Pasar Modal Syariah yang sedang naik daun yaitu Obligasi Syariah atau dikenal dengan istilah Sukuk. Hal ini terbukti dengan banyaknya investor yang memiliki keinginan untuk berinvestasi di ranah syariah dan terhindar dari transaksi riba. Adanya sukuk tentu memberikan respon positif untuk mendorong pasar modal syariah dengan produk yang sesuai dengan akad atau kontrak legal dalam Islam. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia pada

¹ Aditya Bimantara, Ummi Ainun Nadhiroh, and Erlina Komaruljannah, "Strategi Peningkatan Daya Saing Saham Dan Obligasi Syariah Dalam Menghadapi Masa Pandemi Dengan Metode SWOT," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 03 (2021): 1835–44.

triwulan III-2021 tumbuh 3,15% yang menunjukkan bahwasannya Indonesia belum stabil dalam perekonomian ekonomi. Saat ini, Indonesia dan semua negara di dunia menghadapi risiko resesi yang mengancam berbagai sektor di dalamnya yang diakibatkan adanya pandemi covid-19. Adanya pandemi covid-19, dapat berakibat pada defisitnya APBN maka peningkatan sektor rill diharapkan mampu meningkatkan pangsa pasar salah satunya dengan instrumen syariah yang berprinsip dengan bagi hasil. Peran sukuk negara dalam pembangunan adalah sebagai alat meringankan defisit APBN yang mampu digunakan pada pembangunan sektor rill ². Dalam penelitian Hastuti (2018) juga dikatakan bahwa sukuk retail dapat menjadi pionir dalam hal investasi syariah khususnya di bidang sukuk seperti Malaysia ³.

Instrumen keuangan yang diterbitkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah mengalami perkembangan pada pertumbuhan lembaga keuangan syariah Indonesia. Dengan adanya partisipasi dari masyarakat yang ingin menggunakan lembaga keuangan syariah untuk mengembangkan ekonomi dan bisnis menambah peranan yang signifikan pada perekonomian. Pengembangan berbagai alternatif instrumen pembiayaan anggaran negara, khususnya instrumen pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah guna memobilisasi dana publik secara luas telah dilaksanakan oleh pemerintah. Untuk meningkatkan kontribusi keuangan syariah global diperlukan peran aktif baik bagi pembuat kebijakan, pelaku ekonomi, maupun dunia bisnis lainnya. Karena peningkatan keuangan syariah adalah salah satu upaya untuk memperkuat struktur pasar keuangan global. Berikut ini adalah aset keuangan syariah global, dapat dilihat pertumbuhan keuangan syariah global terdapat peningkatan dari tahun ke tahun.



Gambar 1 Perkiraan Aset Keuangan Syariah Global Tahun 2012-2023

Sumber: ⁴

Proporsi Saham Syariah tercatat di Bursa Efek sebanyak 438 saham juga mengalami peningkatan. Salah satunya kapitalisasi pasar saham yang tergabung dalam ISSI per akhir Juni 2021 sebesar Rp3.352,26 triliun, meningkat sebesar 0,22% dibandingkan akhir tahun 2020, sebesar Rp3.344,93 triliun. Sementara itu, pada akhir Juni 2021, ISSI ditutup pada level 171,95 atau menurun sebesar 3,12% dibandingkan indeks ISSI pada akhir tahun 2020 sebesar 177,48. Jika dibandingkan pada tanggal 24 Maret 2020, indeks ISSI mengalami peningkatan sebesar 48,30% dan peningkatan nilai kapitalisasi pasar sebesar 44,15% (OJK, 2021). Begitu pula dengan perkembangan saham syariah di

² Irfan Syauqi Beik, "Memperkuat Pran Sukuk Negara Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia," *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq* 2, no. 2 (2011): 65–72.

³ Erma Sri Hastuti, "Sukuk Tabungan : Investasi Syariah Pendorong Pembangunan Ekonomi Inklusif," *Jurnal Jurisprudence* 7, no. 2 (2018): 114–22, <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i2.4096>.

⁴ L Tuti, "Analisis Peran Green Sukuk Dalam Memperkokoh Keuangan Syariah Dan Menciptakan Indonesia Ramah Lingkungan," *Doctoral Dissertation, UIN Raden Intan Lampung*, 2020.

Jakarta Islamic Index (JII). Menurut penelitian ⁵, saham syariah yang tergabung pada JII mengalami fluktuasi dan rata-rata mengalami peningkatan sebesar 0,14% pada masa pandemi. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun saham konvensional rata-rata mengalami penurunan pada masa pandemi, rata-rata saham syariah tetap mengalami peningkatan. Hal tersebut karena saham syariah memiliki kekuatan transaksi dan bargaining yang cukup baik.

Sukuk dapat dimanfaatkan untuk membangun perekonomian bangsa dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun peluang di atas bukan berarti tanpa tantangan dan hambatan, salah satunya dalam konteks sosial, UU SBSN sangat inklusif terhadap segmen pasar. Investor yang membeli Sukuk Negara perdana lebih didominasi oleh lembaga konvensional. Pengembangan sukuk di Indonesia dapat mendorong pemerintah dalam menghadapi beberapa risiko yang berkenaan dengan likuiditas ⁶. Maka dibutuhkan pengelolaan instrumen syariah di Indonesia agar dapat meminimalkan risiko tersebut. Krisis keuangan atau moneter (Krismon) 1998 yang memberikan pengaruh signifikan dan masih terasa hingga saat ini efeknya seperti tingginya nilai suku bunga dan rendahnya nilai tukar rupiah. Hal ini salah satunya dikarenakan lemahnya pembangunan sektor riil dan hanya berpacu terhadap satu mata uang yakni US Dollar. Jika dilihat dari kondisi pasar Indonesia dengan pertumbuhan perekonomian berkembang, maka negara membutuhkan pendanaan yang mencukupi dan menyokong kegiatan usahanya yaitu dengan penerbitan sukuk ⁷.

Dirjen Pembiayaan Infrastruktur PUPR, Eko Heripoerwanto mengatakan bahwasannya Indonesia membutuhkan kolaborasi pembiayaan untuk mengejar gap infrastruktur yang menjadi bagian penting bagi kebutuhan masyarakat dalam peningkatan nilai konsumsi, akses lapangan kerja, kemakmuran nyata, dan stabilitas makro ekonomi. Namun demikian pembangunan infrastruktur di Indonesia masih mengalami ketertinggalan dengan negara-negara asia lainnya, merujuk pada standar World Economy Forum (WEF) standar pada negara maju berkisar pada angka 70%, sedangkan Indonesia masih berada di angka 43% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Saat ini, secara proporsi APBN Indonesia hanya memenuhi 30% dari pendanaan sehingga membutuhkan 70% alternatif lain ⁸. Untuk itulah pengembangan sukuk di Indonesia bertujuan untuk menyelaraskan program pemerintah dan masyarakat dalam pengambilan ekonomi.

Adapun fokus pada penelitian ini adalah membahas tentang peran sukuk menjadi peluang bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Indonesia. Maka adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui lebih dalam bagaimana perkembangan sukuk sebagai instrumen investasi syariah serta peranannya pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Sukuk

Sukuk atau obligasi syariah adalah surat berharga sebagai instrumen investasi yang diterbitkan berdasarkan suatu transaksi atau akad syariah yang melandasinya (underlying transaction), yang dapat berupa ijarah (sewa), mudharabah (bagi-hasil), musyarakah, atau yang lain ⁹. Atau lebih singkatnya sukuk didefinisikan sebagai surat berharga yang berisi kontrak (akad) pembiayaan berdasarkan prinsip

⁵ Helly Aroza Siregar, "Komparasi Index Saham Syariah Dan Konvensional Selama Pandemi Covid-19 Di Indonesia," *Bilancia : Jurnal Ilmiah Akuntansi* 4, no. 3 (2020): 289–97.

⁶ Hastuti, "Sukuk Tabungan : Investasi Syariah Pendorong Pembangunan Ekonomi Inklusif."

⁷ Muhammad Ardi, "Pengaruh Sukuk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia," *Iqtishaduna* 9, no. 1 (2018): 85–97.

⁸ Hendra Kusuma, "Daya Saing Infrastruktur RI Masih Tertinggal Jauh Dari Negara Lain," 2020.

⁹ (Muawanah et al., 2021)

syariah¹⁰. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor: 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah menjelaskan Sukuk merupakan suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang sukuk yang mewajibkan emiten membayar pendapatan kepada pemegang sukuk berupa bagi hasil/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

Pengertian sukuk menurut Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) adalah sebagai sertifikat dari suatu nilai yang direpresentasikan setelah penutupan pendaftaran, bukti terima nilai sertifikat, dan menggunakannya sesuai rencana. Sama halnya dengan bagian dan kepemilikan atas aset yang jelas, barang, atau jasa, atau modal dari suatu proyek tertentu atau modal dari suatu aktivitas inventasi tertentu. Setiap sukuk yang diterbitkan harus mempunyai aset yang dijadikan dasar penerbitan (underlying asset). Penggunaan dana hasil sukuk juga tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Berbeda dengan proses obligasi yang dapat digunakan secara bebas tanpa memperhatikan ketentuan syariah¹¹.

Sehingga dapat dikatakan sukuk merupakan Islamic Bonds, Islamic Securitization, asset-backed, yang secara keseluruhan sukuk merupakan surat hutang Islam yang tidak hanya berkaitan dengan pemindahan finansial atau modal dari para investor ke penerbit, tetapi juga pemindahan aset atau manfaat atas aset tersebut dari penerbit kepada para investor. Berdasarkan penerbitnya, ada 3 jenis sukuk, yaitu¹²:

- a) Sukuk pemerintah atau sukuk negara, ialah surat hutang syariah yang diterbitkan oleh negara untuk keperluan membiayai APBN negara atau proyek-proyek negara, seperti pembangunan infrastruktur.
- b) Sukuk korporasi, ialah surat hutang syariah yang diterbitkan oleh perusahaan atau emiten untuk keperluan membiayai kebutuhan dana perusahaan atau proyek-proyek perusahaan.
- c) Sukuk global, ialah surat hutang syariah yang diterbitkan oleh negaranegara lain secara internasional.

Sedangkan berdasarkan akad atau perjanjian yang digunakan, ada 7 jenis sukuk, yaitu: Sukuk Ijarah, Sukuk Salam, Sukuk Istishna', Sukuk Murabahah, Sukuk Mudharabah, Sukuk Musyarakah, Hybrid Sukuk. Namun sukuk yang saat ini banyak digunakan ialah sukuk ijarah, murabahah, dan mudharabah. Dengan adanya produk keuangan sukuk ini, menjadi alternatif investasi bagi para investor, baik investor muslim maupun non muslim.

Landasan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an tentang Sukuk (Surat Berharga Syariah Negara) Q.S Al-Maidah (5) : 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukumhukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Sebagai salah satu Efek Syariah Sukuk memiliki karakteristik yang berbeda dengan obligasi. Sukuk bukan merupakan surat utang, melainkan bukti kepemilikan bersama atas suatu asset/proyek. Penggunaan dana sukuk harus digunakan untuk kegiatan usaha yang halal. Imbalan bagi pemegang

¹⁰ Muhammad Iqbal Fasa, "Sukuk : Teori Dan Implementasi," *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2016): 80, <https://doi.org/10.31332/lifalah.v1i1.476>.

¹¹ Anna Nurlita, "Investasi Di Pasar Modal Syariah Dalam Kajian Islam," *Kutubkhanah: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 17, no. 1 (2015): 1–20.

¹² E Mersilia, "Investasi Syariah: Perkembangan Obligasi Syariah Di Indonesia," 2014.

sukuk dapat berupa imbalan, bagi hasil, atau margin. Sesuai dengan jenis akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk. Adapun perbandingan antara obligasi syariah dengan obligasi konvensional adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Perbandingan Sukuk dan Obligasi

Deskripsi	Sukuk	Obligasi
Prinsip Dasar	Bukan merupakan surat utang, melainkan kepemilikan bersama atas suatu aset/manfaat atas aset/jasa/proyek/investasi tertentu	Surat pernyataan utang dari issuer dalam penerbit obligasi
Klaim	Klaim kepemilikan atas aset/manfaat atas aset/jasa/proyek/investasi tertentu	Klaim piutang kepada penerbit
Penggunaan Dana	Penggunaan dana hanya untuk kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah	Penggunaan dana tidak terbatas pada kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
Jenis Penghasilan	Imbalan, bagi hasil, margin	Bunga/kupon
Underlying Asset	Perlu	Tidak perlu

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (diakses pada Oktober 2022)

Perkembangan Sukuk

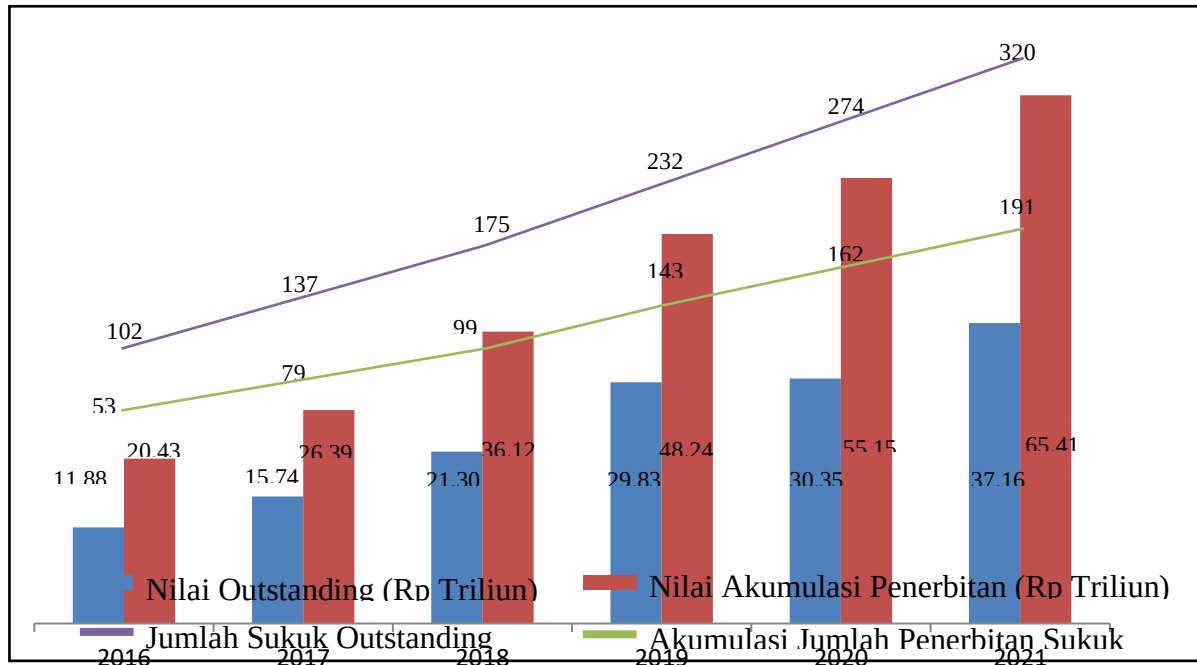
Pesatnya perkembangan industri keuangan syariah juga diikuti oleh pesatnya perkembangan keuangan dan pembiayaan syariah yaitu sukuk atau yang juga dikenal dengan nama obligasi syariah. Fakta pasar selama ini menunjukkan bahwa penerbitan sukuk sangat disambut dengan antusias. Hampir semua sukuk yang diterbitkan diserap habis oleh pasar. Perkembangan sukuk di Indonesia didorong oleh inisiasi sektor swasta. Diawali oleh penerbitan sukuk mudharabah pada tahun 2002 oleh Indosat dengan nilai 175 miliar. Struktur sukuk yang digunakan pada periode 2002-2004 lebih didominasi oleh mudharabah sebesar Rp. 740 miliar (88%), sisanya ijarah sebesar Rp. 100 miliar (12%). Adapun periode 2004-2007 didominasi oleh ijarah sebesar Rp. 2.194 triliun (92%), sisanya mudharabah sebesar Rp. 200 miliar (8%). Perkembangan sukuk korporasi di Indonesia pada umumnya merupakan inisiasi dari underwriter, bukan dari korporasi penerbit sukuk itu sendiri. Hal ini terjadi akibat kurangnya pemahaman tentang kelebihan dan kelemahan sukuk¹³.

Pada akhir Juli 2008, telah ada 31 penerbitan sukuk korporasi di Indonesia dengan nilai total 5,1 triliun. Penerbitan sukuk pertahunnya cenderung fluktuatif. Nilai nominal penerbitan terbesar terjadi pada tahun 2007 (Rp.1.3 triliun) dan 2008 (Rp.1.5 triliun). Dilihat dari masa jatuh tempo, mayoritas sukuk korporasi di Indonesia memiliki jatuh tempo lima tahun (19 penerbitan). Namun, sukuk dengan masa jatuh tempo hingga 10 tahun juga semakin banyak diterbitkan, mengingat perusahaan asuransi dan dana pensiun termasuk investor utama yang membutuhkan instrumen investasi jangka panjang. Untuk perusahaan yang melakukan penerbitan ganda (double issuing), masa jatuh tempo sukuk mengikuti masa jatuh tempo obligasi konvensional¹⁴.

¹³ D Ascarya, Y., & Yumanita, "Comparing The Development of Islamic Financial/Bond Market in Malaysia and Indonesia," in *IRTI Publications (2008)* (Saudi Arabia, 2007).

¹⁴ Aam Rusydiana Jarkasih, Muhamad & Slamet, "Perkembangan Pasar Sukuk: Perbandingan Indonesia, Malaysia, Dan Dunia," *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi: Antispasi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta* 1, no. 2 (2009): 1–18.

Keberadaan sukuk (surat utang berbasis syari'ah) dapat memperkuat kondisi ekonomi Indonesia dan menahan bubble ekonomi karena akan memperbanyak portfolio mata uang asing selain dolar ¹⁵. Adanya hubungan yang kuat pada lingkungan ekonomi makro dan pasar modal. Oleh karena itu, jika akan melakukan investasi pada obligasi syariah maka harus mempertimbangkan analisis ekonomi makro. Dan juga mengamati trend obligasi konvensional, dimana suku bunga tetap lebih populer dibandingkan dengan suku bunga yang selalu berubah mengikuti suku bunga di pasaran.



Gambar 2 Perkembangan Sukuk di Indonesia

Sumber: Statistik Sukuk ¹⁶

Gambar di atas merupakan statistik peningkatan penjualan sukuk di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir yang bersumber dari data Otoritas Jasa Keuangan. Di Indonesia sudah banyak sekali sukuk yang telah terbit, baik sukuk korporasi maupun SBSN. Mengutip data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), nilai akumulasi atas penerbitan sukuk korporasi hingga September 2021 bernilai sebesar Rp65,41 triliun.

Saat ini, sukuk dijadikan sebagai salah satu investasi yang sangat diminati oleh sebagian besar badan usaha. Karena dibandingkan dengan investasi lainnya, sukuk memiliki risiko yang rendah dan tergolong kepada investasi yang lebih aman sehingga para investor lebih tertarik untuk membeli sukuk.

Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi berarti adanya suatu proses pembangunan yang terjadi terus menerus yang bersifat menambah dan memperbaiki segala sesuatu menjadi lebih baik lagi ¹⁷. Adanya proses

¹⁵ Dede Abdul Fatah, "Perkembangan Obligasi Syari'ah (Sukuk) Di Indonesia : Analisis Peluang Dan Tantangan," *Al-'Adalah X*, no. 1 (2011): 281–301.

¹⁶ IDX, "Market Update Pasar Modal Syariah Indonesia," *Packaging Magazine* 6, no. 4 (2021): 14.

¹⁷ Riyan Muda, Rosalina Koleangan, and Josep Bintang Kalangi, "Pengaruh Angka Harapan Hidup, Tingkat Pendidikan Dan Pengeluaran Perkapita Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sulawesi Utara Pada Tahun 2003-2017," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 19, no. 01 (2019): 44–55.

pembangunan itu diharapkan adanya kenaikan pendapatan riil masyarakat berlangsung untuk jangka panjang. Pembangunan sektor-sektor ekonomi yang berlangsung pada setiap daerah di wilayah Indonesia harus disesuaikan dengan potensi dan prioritas yang dimiliki oleh masing-masing daerah sehingga keseluruhan pembangunan merupakan satu kesatuan yang utuh dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional.

Dengan adanya pembangunan ekonomi maka output atau kekayaan suatu masyarakat atau perekonomian akan bertambah. Di samping itu kesejahteraan masyarakat juga akan bertambah karena pembangunan ekonomi telah dapat menambah kesempatan bagi masyarakat mengadakan pilihan yang lebih luas. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan dalam Produk Domestik Bruto (PDB)/Produk Nasional Bruto (PNB) tanpa melihat apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan/pertambahan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi dalam negara tersebut terjadi atau tidak ¹⁸.

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses pembangunan yang terjadi terus menerus yang bersifat dinamis ¹⁹. Pendapatan perkapita riil sangat berkaitan dengan pembangunan ekonomi yaitu pendapatan nasional dan jumlah penduduk. Sehingga suatu perekonomian negara baru dapat dinyatakan berkembang jika pendapatan perkapita menunjukkan peningkatan. Karena kegiatan ekonomi yang secara rata-rata meningkat dari tahun ke tahun baru dapat dikatakan mengalami pembangunan ekonomi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain ²⁰. Jenis penelitian deskriptif kualitatif kerap digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial.

Data pada penelitian ini dikumpulkan secara studi pustaka (Library Research) dimana permasalahan penelitian dilandasi pada data-data yang berasal dari berbagai literatur yaitu mempelajari dokumen yang berkaitan dengan seluruh data yang diperlukan dalam penelitian. Jenis data yang digunakan berupa data sekunder bersumber pada studi pustaka, literatur, dan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan topik atau penelitian yang ditulis.

HASIL PEMBAHASAN

Peran Sukuk dalam Pembangunan Ekonomi

Sebagai negara berkembang, Indonesia semakin gencar melakukan pembangunan di berbagai sektor strategis untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya kenaikan jumlah produksi barang dan jasa pada suatu negara menunjukkan pertumbuhan ekonomi sedang mengalami peningkatan. Sehingga dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka akan memperlancar pembangunan nasional. Pertumbuhan dan stabilitas sektor riil sangat diengaruhi oleh kebijakan-kebijakan fiskal yang diterapkan oleh kementerian keuangan bersama dengan pemerintah. Sedangkan kebijakan moneter sendiri mempengaruhi pertumbuhan dan stabilitas sektor moneter yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

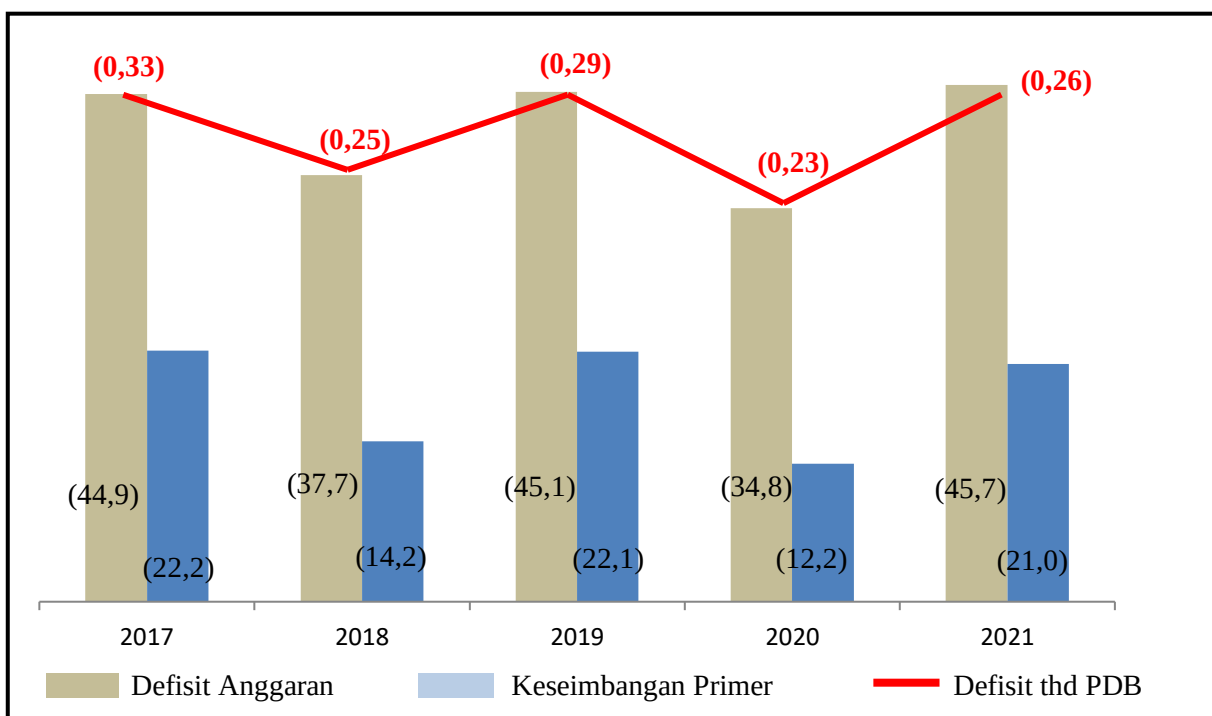
¹⁸ Muhammad Hasan and Aziz Muhammad, 1/ *Pembangunan Ekonomi*, 2018.

¹⁹ Muda, Koleangan, and Kalangi, "Pengaruh Angka Harapan Hidup, Tingkat Pendidikan Dan Pengeluaran Perkapita Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sulawesi Utara Pada Tahun 2003-2017."

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (CV Alfabeta, 2018).

Anggaran pendapatan belanja negara (APBN) adalah masalah yang prioritas kebijakan fiskal yaitu sebagai pencapaian target penerimaan negara dan implementas belanja sesuai dengan waktu dan tujuannya (Kuntadi et al., 2022). Instrument utama yang digunakan pemerintah untuk meraih target penerimaan fiskal adalah pajak. Akan tetapi, pajak juga dapat memberatkan masyarakat sehingga menyebabkan daya beli masyarakat menurun dan berefek pada penghambatan pertumbuhan ekonomi. Untuk itulah, perlunya instrument pendanaan lain yang lebih efektif dan tepat untuk menutupi defisit APBN. Percepatan pembangunan dan proyek-proyek pemerintah lainnya untuk pembangunan ekonomi sangat berpengaruh bagi berjalannya aktifitas ekonomi yang kondusif dan stabil. Maka dari itu, pemerintah pun menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau yang dikenal dengan sukuk.

Salah satu fungsi sukuk adalah mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat sehingga dapat dijadikan solusi untuk mengatasi permasalahan inflasi di Indonesia. Obligasi dan sukuk juga berperan sebagai penutup defisit APBN untuk membiayai anggaran yang berasal dari hutang. Kebutuhan dana pemerintah untuk pembiayaan APBN terus meningkat sehingga menyebabkan defisit anggaran yang semakin tinggi. Realisasi APBN sampai dengan 31 Januari 2021 mencatatkan pendapatan negara terkontraksi 4,83 persen (yoy) realisasi belanja negara tumbuh sebesar 4,19 persen (yoy), serta defisit anggaran berada pada level 0,26 persen terhadap PDB (tahun 2020 0,23 persen terhadap PDB).



Gambar 3 Defisit dan Keseimbangan Primer s.d. 31 Januari, 2017-2021

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan ²¹

Secara ringkas, realisasi APBN sampai dengan 31 Januari 2021 mencatatkan pendapatan negara mencapai Rp100,07 triliun (5,74 persen dari target), lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2020 sebesar Rp105,15 triliun. Di sisi lain, realisasi belanja negara mencapai Rp145,77 triliun

²¹ www.kemenkeu.go.id, "APBN KITA , Agustus," no. November (2021): 1–78.

(5,30 persen dari pagu), lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2019 sebesar Rp139,90 triliun. Adapun rincian realisasi tersebut yaitu:

a) Penerimaan Perpajakan mencapai Rp80,96 triliun, terkontraksi sebesar 5,18 persen dari periode yang sama pada tahun 2020 yang mencapai Rp85,38 triliun. Realisasi penerimaan perpajakan terdiri atas:

- 1) Penerimaan Pajak sebesar Rp68,45 triliun, terkontraksi 15,32 persen dari tahun 2020 yang mencapai Rp80,84 triliun.
- 2) Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp12,50 triliun, tumbuh signifikan sebesar 175,34 persen dari tahun 2020 sebesar Rp4,54 triliun.

b) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencatatkan realisasi sebesar Rp19,11 triliun, terkontraksi sebesar 2,89 persen dari periode dari tahun 2020 yang mencapai Rp19,67 triliun.

c) Penerimaan Hibah sebesar Rp4,9 miliar, lebih rendah dari periode yang sama pada tahun 2020 yang mencapai sebesar Rp94,4 miliar.

d) Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp94,67 triliun, tumbuh 32,39 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2020 yang mencapai Rp71,51 triliun, yang terdiri atas:

- 1) Belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp48,04 triliun, tumbuh 55,61 persen dari realisasi pada periode yang sama tahun 2020 yang mencapai Rp30,87 triliun;
- 2) Belanja Non-K/L sebesar Rp46,63 triliun, tumbuh 14,75 persen dari realisasi pada periode yang sama tahun 2020 yang mencapai Rp40,64 triliun.

e) Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp51,10 triliun, terkontraksi sebesar 25,29 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp68,39 triliun.

Berdasarkan realisasi pendapatan negara dan belanja negara sampai dengan 31 Januari 2021 tersebut, defisit APBN mencapai Rp45,71 triliun atau 0,26 persen terhadap PDB, dimana keseimbangan primer sebesar negatif Rp21,05 triliun. Di sisi lain, realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp165,86 triliun, sehingga s.d. 31 Januari 2020 terdapat kelebihan pembiayaan anggaran sebesar Rp120,15 triliun.

Tujuan pembangunan nasional ialah mendapatkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dengan memiliki basis yang luas. Dengan meningkatnya pembangunan nasional, dapat menjadi pendanaan bagi penutupan defisit APBN. Pembangunan ini seharusnya dilakukan di berbagai wilayah (Provinsi dan Kota/ Kabupaten) sehingga memunculkan efek berganda dalam praktiknya. Adapun fungsi sukuk dalam pembangunan nasional adalah:

a) Membantu menutup defisit anggaran negara melalui penerbitan SBSN.

APBN yang terpenuhi dari sumber dana sukuk, dengan mudah kemudian disalurkan ke dunia usaha melalui kredit khusus yang dibuat semurah mungkin, tujuannya untuk mengurangi adanya dampak PHK akibat perusahaan kekurangan cashflow serta likuiditas keuangan. Sukuk juga dijadikan sebagai sumber dana oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan, sehingga menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat dalam jangka panjangnya.

b) Mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah nasional

Industri keuangan syariah dapat memperjualbelikan SBSN sesuai dengan kebutuhan dan sarana pemenuhan likuiditas saat berkelebihan dana. Kepemilikan sukuk negara domestik pada perbankan syariah sebagai bagian penyediaan aset yang aman bagi perbankan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap rasio nilai total pembiayaan perbankan syariah terhadap GDP yang mengukur perkembangan perbankan syariah²². SBSN juga menjadi alternatif investasi dalam mengembangkan

²² Azwar Iskandar, "Pengaruh Penerbitan Sukuk Negara Sebagai Pembiayaan Defisit Fiskal Dan Kondisi Ekonomi Makro Terhadap Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia (The Effect of Sovereign Sukuk Issuance as

aset. Telah tersedia berbagai tenor SBSN, baik jangka pendek (tenor 6 bulan) sampai dengan tenor panjang (diatas 10 tahun). Tersedianya diversifikasi tenor tersebut memberikan kemudahan bagi industri dalam mengatur portofolio investasinya.

c) Pembiayaan pembangunan infrastruktur

Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2011 tentang Pembiayaan Proyek melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), pemerintah telah mengembangkan pembiayaan infrastruktur melalui penerbitan sukuk negara. Penerbitan seri-seri Sukuk Negara yang menggunakan underlying asset berupa proyek infrastruktur telah bertambah luasnya ruang fiskal APBN. Pemanfaatan penerbitan SBSN untuk pembangunan infrastruktur juga mempunyai arti memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk ikut membantu pembangunan bangsa. Banyak pembangunan infrastruktur yang dihasilkan dari penerbitan sukuk negara antara lain Jembatan Youtefa (Holtekamp) Papua, Jembatan Musi 4 Palembang, Gedung Perkuliahan IAIN Salatiga, Tol Solo - Ngawi Seksi I Colomadu Karanganyar Jawa Tengah dan banyak pembangunan lainnya.

d) Membantu BI dalam melakukan Open Market Operation (OMO)

Tersedianya SBSN dalam tenor pendek (6 bulan), Bank Indonesia dapat memanfaatkan instrumen tersebut untuk melakukan OMO. Bank Indonesia melakukan operasi pasar terbuka dengan cara mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar. Dalam rangka menjaga tingkat inflasi, otoritas moneter (BI) memerlukan beberapa instrumen untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Maka dari itu, SBSN dapat menjadi solusi yang baik. BI dapat memperoleh SBSN jangka pendek dengan membeli di pasar perdana pada saat pemerintah mengadakan lelang SBSN bertenor pendek atau disebut sebagai Surat Perbendaharaan Negara-Syariah (SPN-S)²³.

e) Mendorong tertib pengelolaan BMN

Underlying asset dalam penerbitan SBSN telah mendorong tertib administrasi pengelolaan BMN²⁴. Penggunaan BMN untuk underlying asset saat telah menggerakkan instansi Pemerintah untuk melakukan tertib administrasi dan pengelolaan aset-aset yang dimilikinya. Pemanfaatan BMN ini juga mendorong Kementerian Keuangan untuk melakukan penilaian kembali terhadap aset negara, sehingga benar-benar diketahui harga riil dari aset negara tersebut dan memperkuat posisi akuntabilitas aset-aset oleh negara.

Optimasi Peran Sukuk di Indonesia

Pengembangan sukuk dan instrumen investasi syariah juga harus memperhatikan aspek kualitas disamping kuantitas. Adanya variasi sukuk yang inovatif dan kompetitif dapat menjadi upaya menarik minat investor untuk berinvestasi. Namun, penjualan dari sukuk sendiri belum maksimal, sehingga diperlukan adanya strategi agar penjualan sukuk bisa lebih optimal. Karena jika dibandingkan dengan malaysia dimana pengembangan keuangan syariah disana telah menjadikannya sebagai pasar sukuk terbesar, Indonesia masih kalah unggul²⁵.

Implementasi kebijakan sukuk di Indonesia diharapkan berjalan dengan sangat baik. Maka dari itu, dibutuhkannya beberapa strategi yang harus dilakukan dalam mengoptimalkan peran sukuk pada pembangunan ekonomi, yaitu: 1) Melakukan sosialisasi dalam rangka memberikan pemahaman kepada

State Fiscal Funding and Macroeconomics on The Islamic Banking Gro," *SSRN Electronic Journal*, no. January 2014 (2018), <https://doi.org/10.2139/ssrn.2834656>.

²³ Siti Latifah, "Peran Sukuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Dalam Pertumbuhan Pembangunan Ekonomi Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (2020): 421, <https://doi.org/10.29040/jjei.v6i3.1369>.

²⁴ Latifah.

²⁵ Dedi Iskanto, Sekolah Tinggi, and Ilmu Ekonomi, "Industri Keuangan Bank Syariah Nasional Indonesia Dalam," *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, no. December (2017).

masyarakat luas tentang keberadaan sukuk dengan melibatkan banyak pihak seperti praktisi, pengamat, akademisi, dan ulama di bidang ekonomi Islam ²⁶, 2) Mengubah mindset masyarakat yang masih bersikap pragmatis, yaitu mereka yang mempunyai orientasi keuntungan semata. Selama ini sukuk hanya dianggap sebagai “the second best choice”, dengan mempertimbangkan lebih dahulu pilihan-pilihan yang lain, 3) Pemerintah memberikan peluang kepada BUMN untuk dapat menawarkan investasi secara langsung baik melalui penerbitan sukuk maupun project financing secara syariah atas proyek-proyek infrastruktur yang direncanakan, 4) Pengembangan struktur secara inovatif dengan menawarkan sukuk sesuai dengan keadaan para investor seperti perubahan basis ²⁷, 5) Kebijakan dan insentif yang memadai sangat dibutuhkan dalam aspek perpajakan. Contohnya seperti Securities Commission Malaysia yang memberikan insentif pajak yang menarik untuk penerbitan obligasi syariah. Di mana, biaya yang dikeluarkan terkait emisi obligasi syariah menjadi pengurang pajak. Selain itu juga pembayaran zakat untuk obligasi syariah juga dihitung sebagai pengurang pajak. Hal ini menjadikan sukuk Malaysia sangat diminati investor internasional ²⁸.

KESIMPULAN

Sukuk merupakan salah satu instrumen keuangan syariah yang populer dan sedang berkembang pesat pertumbuhannya di dunia. Instrumen sukuk digunakan sebagai instrumen pertumbuhan uang dengan melibatkan aktivitas masyarakat yang berperan sebagai investor dalam dinamika pasar uang serta menjadi dasar keuntungan investasi yang telah disepakati atau berdasarkan sewa terhadap properti berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Perkembangan sukuk yang semakin pesat juga diimbangi dengan perkembangan industri keuangan syariah yang semakin maju dan keberadaan sukuk juga memperkuat kondisi ekonomi Indonesia, terkhususnya dalam pembangunan ekonomi nasional yaitu, menutup defisit anggaran negara melalui penerbitan SBSN, mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah nasional, pembiayaan pembangunan infrastruktur, membantu BI dalam melakukan Open Market Operation (OMO), dan mendorong tertib pengelolaan BMN. Namun, penjualan dari sukuk sendiri belum maksimal, sehingga diperlukannya inisiatif strategi agar penjualan sukuk bisa lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardi, Muhammad. “Pengaruh Sukuk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.” *Iqtishaduna* 9, no. 1 (2018): 85–97.
- Ascarya, Y., & Yumanita, D. “Comparing The Development of Islamic Financial/Bond Market in Malaysia and Indonesia.” In *IRTI Publications* (2008). Saudi Arabia, 2007.
- Beik, Irfan Syauqi. “Memperkuat Pran Sukuk Negara Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq* 2, no. 2 (2011): 65–72.
- Bimantara, Aditya, Ummi Ainun Nadhiroh, and Erlina Komaruljannah. “Strategi Peningkatan Daya Saing Saham Dan Obligasi Syariah Dalam Menghadapi Masa Pandemi Dengan Metode SWOT.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 03 (2021): 1835–44.
- Fasa, Muhammad Iqbal. “Sukuk : Teori Dan Implementasi.” *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2016): 80. <https://doi.org/10.31332/lifalah.v1i1.476>.
- Fatah, Dede Abdul. “Perkembangan Obligasi Syari’ah (Sukuk) Di Indonesia : Analisis Peluang Dan

²⁶ Fatah, “Perkembangan Obligasi Syari’ah (Sukuk) Di Indonesia : Analisis Peluang Dan Tantangan.”

²⁷ Reza Henning Wijaya, “Investasi Syariah Dan Pertumbuhan Ekonomi: Optimasi Peran Sukuk Sebagai Penunjang Pembangunan Ekonomi Nasional,” *Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2021): 70–82, <https://doi.org/10.37058/jes.v6i1.2414>.

²⁸ D Sukuk, “Sukuk Sebagai Alternatif Investasi Syari’ah Di Indonesia,” *Justicia Islamica* 8, no. 1 (2011).

- Tantangan.” *Al-’Adalah* X, no. 1 (2011): 281–301.
- Hasan, Muhammad, and Aziz Muhammad. 1| *Pembangunan Ekonomi*, 2018.
- Hastuti, Erma Sri. “Sukuk Tabungan : Investasi Syariah Pendorong Pembangunan Ekonomi Inklusif.” *Jurnal Jurisprudence* 7, no. 2 (2018): 114–22. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i2.4096>.
- IDX. “Market Update Pasar Modal Syariah Indonesia.” *Packaging Magazine* 6, no. 4 (2021): 14.
- Iskamto, Dedi, Sekolah Tinggi, and Ilmu Ekonomi. “Industri Keuangan Bank Syariah Nasional Indonesia Dalam.” *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, no. December (2017).
- Iskandar, Azwar. “Pengaruh Penerbitan Sukuk Negara Sebagai Pembiayaan Defisit Fiskal Dan Kondisi Ekonomi Makro Terhadap Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia (The Effect of Sovereign Sukuk Issuance as State Fiscal Funding and Macroeconomics on The Islamic Banking Gro.” *SSRN Electronic Journal*, no. January 2014 (2018). <https://doi.org/10.2139/ssrn.2834656>.
- Jarkasih, Muhamad & Slamet, Aam Rusydiana. “Perkembangan Pasar Sukuk: Perbandingan Indonesia, Malaysia, Dan Dunia.” *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi: Antisipasi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta* 1, no. 2 (2009): 1–18.
- Kusuma, Hendra. “Daya Saing Infrastruktur RI Masih Tertinggal Jauh Dari Negara Lain,” 2020.
- Latifah, SIti. “Peran Sukuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Dalam Pertumbuhan Pembangunan Ekonomi Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (2020): 421. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1369>.
- Mersilia, E. “Investasi Syariah: Perkembangan Obligasi Syariah Di Indonesia,” 2014.
- Muawanah, M., Sundari, S., & Anggraeni, Y. N. “Analisis Peluang Dan Tantangan Obligasi Syariah (Sukuk) Di Indonesia.” *Juornal of Economics and Policy Studies* 2, no. 1 (2021): 32–43.
- Muda, Riyan, Rosalina Koleangan, and Josep Bintang Kalangi. “Pengaruh Angka Harapan Hidup, Tingkat Pendidikan Dan Pengeluaran Perkapita Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sulawesi Utara Pada Tahun 2003-2017.” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 19, no. 01 (2019): 44–55.
- Nurlita, Anna. “Investasi Di Pasar Modal Syariah Dalam Kajian Islam.” *Kutubkhanah: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 17, no. 1 (2015): 1–20.
- Siregar, Helly Aroza. “Komparasi Index Saham Syariah Dan Konvensional Selama Pandemi Covid-19 Di Indonesia.” *Bilancia : Jurnal Ilmiah Akuntansi* 4, no. 3 (2020): 289–97.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. CV Alfabeta, 2018.
- Sukuk, D. “Sukuk Sebagai Alternatif Investasi Syari’ah Di Indonesia.” *Justicia Islamica* 8, no. 1 (2011).
- Tuti, L. “Analisis Peran Green Sukuk Dalam Memperkokoh Keuangan Syariah Dan Menciptakan Indonesia Ramah Lingkungan.” *Doctoral Dissertation, UIN Raden Intan Lampung*, 2020.
- Wijaya, Reza Henning. “Investasi Syariah Dan Pertumbuhan Ekonomi: Optimasi Peran Sukuk Sebagai Penunjang Pembangunan Ekonomi Nasional.” *Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2021): 70–82. <https://doi.org/10.37058/jes.v6i1.2414>.
- www.kemenkeu.go.id. “APBN KITA , Agustus,” no. November (2021): 1–78.